



ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR SEBELUM DAN SAAT PANDEMI COVID-19

Bunga Qolbiyah Syahara^{1*}, Muhammad Aufa²

^{1,2}Universitas Muhammadiyah Gresik, Jl. Sumatera 101, Gresik, Indonesia

ABSTRACT

This study aims to analyze the financial performance of the East Java Provincial Government before and during the Covid-19 pandemic. The object of this research is the Regional Government in East Java. This study uses a comparative quantitative research approach. The type of data used is documentary data and the data source used is secondary data. The population used in this study were 38 LKPDs in East Java Province which had been audited by the East Java BPK and statistical data from the East Java BPS. While the sampling technique using a saturated sampling technique. The data analysis technique used is descriptive statistics, normality test and different test. Based on the data analysis carried out, it was concluded that there were significant differences in financial independence, financial flexibility, operational solvency and no significant differences in short-term solvency, long-term solvency, solvency services of the East Java Provincial Government before and during the Covid-19 pandemic.

Type of Paper : Empiris / Tinjauan

Keywords : Financial Performance, Financial Autonomy, Financial Flexibility, Operational Solvency, Regional Financial Management Index

1. Pendahuluan

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah, maka Pemerintah Daerah mengurus pemerintahannya sendiri sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Dalam otonomi daerah, kewajiban daerah dalam merencanakan, mengelola, menilai dan mengevaluasi setiap kebijakan yang diambil untuk memajukan kesejahteraan daerahnya. Salah satu kebijakan yang perlu dilakukan yaitu kebijakan keuangan (Habibi dkk., 2021).

Kebijakan keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia tercermin dari struktur APBD Daerah yang bersangkutan. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyatakan bahwa APBD dirancang menggunakan orientasi prestasi kerja yang ingin diraih.

^{1*} Info Artikel: Direvisi: 24 Maret 2022
Diterima: 19 Mei 2022

^{2*} Kontak Penulis:
E-mail: Bungaqs09@gmail.com¹. aufa@umg.ac.id²
Afiliasi: Universitas Muhammadiyah Gresik

Dalam mendorong kebijakan tersebut, maka diperlukan rancangan pendekatan kinerja menggunakan rasio kinerja keuangan atas APBD yang sudah diputuskan dan disahkan. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2020 tentang Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah yang disingkat dengan IPKD ditetapkan pada tanggal 9 Maret 2020 dan diberlakukan pada tanggal 24 Maret 2020. IPKD merupakan satuan ukuran berdasarkan dimensi dan indikator untuk menilai kinerja keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel dalam periode tertentu.

Pemerintah Daerah di Jawa Timur terus menunjukkan peningkatan dalam meraih Opini WTP atas LKPD. Hal tersebut menunjukkan kepedulian Pemerintah Daerah di Jawa Timur dalam menyempurnakan tata kelola keuangan daerah yang semakin baik. Meskipun demikian, opini WTP tersebut tidak menjamin entitas yang bersangkutan tidak ada korupsi dikarenakan pemeriksaan laporan keuangan yang dilakukan BPK tidak ditujukan secara khusus untuk mendeteksi adanya korupsi. Akan tetapi BPK tetap mengungkapkan apabila menemukan ketidaksesuaian baik yang berpengaruh maupun tidak berpengaruh terhadap opini atas laporan keuangan.

Pada 11 Maret 2021, World Health Organization (WHO) telah resmi mengumumkan kejadian luar biasa Coronavirus Disease 2019 atau Covid-19 sebagai pandemi global. Tingginya kecepatan penyebaran wabah ini memberikan dampak negatif yang besar bagi seluruh negara, baik dari sisi kesehatan, sosial, kesejahteraan, dan ekonomi. Oleh karena itu, pemerintah mengkaji kembali kebijakan ekonomi yang telah ditetapkan agar sesuai dengan situasi yang terjadi dalam rangka percepatan penanganan Covid-19 yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona* dan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang *Refocussing* Kegiatan, Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang dan Jasa. Situasi pandemi Covid-19 di Indonesia semakin melandai saat ini, kinerja keuangan dan pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur diperkirakan mulai meningkat kembali.

Waktu yang berdekatan antara penetapan IPKD dengan pandemi global Covid-19 memicu pertanyaan mengenai bagaimana kinerja keuangan daerah yang telah berjalan mengingat belum adanya pedoman buku pengukuran kinerja keuangan daerah (Habibi dkk., 2021). Sebelum ada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2020 tentang IPKD, pengukuran kinerja keuangan dilakukan dengan menghitung rasio-rasio keuangan yang ada dalam APBD. Analisis rasio keuangan yang ada dalam APBD dihitung dengan membandingkan hasil yang telah diperoleh pada satu periode dan dibandingkan dengan periode sebelumnya untuk diketahui bagaimana *trend* yang terjadi.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan dari penelitian ini, yaitu: apakah ada perbedaan kinerja keuangan pemerintah daerah Provinsi Jawa Timur sebelum dan saat pandemi covid-19. Kinerja keuangan ini ditentukan melalui tingkat kemandirian keuangan, fleksibilitas keuangan, solvabilitas jangka pendek, solvabilitas jangka panjang dan solvabilitas layanan.

2. Tinjauan Pustaka

2.1 Teori Kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan wewenang Pemerintah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam mengurus kehidupan masyarakat di berbagai aspek (Mustari, 2015:1). Keterkaitan kebijakan publik dalam penerapan pengelolaan keuangan di Indonesia baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, dituntut untuk bisa dipercayai dan akuntabel dalam menjalankan tugas dan kewenangannya terhadap kepentingan masyarakat. Di masa pandemi Covid-19, mengharuskan pemerintah untuk bergerak cepat akan kebijakan publik yang harus digeser dan digantikan dengan kebijakan terbaru sesuai kondisi yang ada guna pemulihan ekonomi di Indonesia. Oleh karena itu Pemerintah Indonesia melakukan percepatan pemulihan ekonomi melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Covid-19 Dan Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Membahayakan Perekonomian Nasional Dan Stabilitas Sistem Keuangan.

2.2 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, laporan keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara atau daerah selama satu periode. LKPD merupakan wujud dari pertanggungjawaban kepada masyarakat yang memuat sumber daya ekonomi serta kewajiban pemerintah pada periode tertentu yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

2.3 Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Kinerja keuangan pemerintah daerah merupakan kemampuan daerah mengatur dan mengeksplorasi sumber-sumber keuangan asli daerah untuk memenuhi kebutuhannya. Pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah dilakukan untuk memenuhi tiga maksud yaitu membantu pemerintah untuk tetap fokus pada tujuan dan sasaran dan program kerja, sebagai sarana pengalokasian sumber daya dan pengambilan keputusan, serta sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat dan membenahi komunikasi kelembagaan (Mardiasmo, 2009:121).

2.4 Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah

Menurut Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2020, IPKD atau Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu suatu ukuran yang ditetapkan berdasarkan seperangkat dimensi dan indikator untuk menilai kualitas kinerja tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam periode tertentu. Menurut Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2020 Pasal 11 mengatakan, kondisi keuangan daerah merupakan salah satu dari enam dimensi Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah yang terdiri atas enam indikator yaitu kemandirian keuangan, fleksibilitas keuangan, solvabilitas operasional, solvabilitas jangka pendek, solvabilitas jangka panjang, dan solvabilitas layanan.

2.5 Kebijakan Terkait Percepatan Penanganan Pandemi Covid-19

Tanggal 9 Maret 2020 WHO telah resmi mendeklarasikan *Corona Virus Disease* 2019 sebagai wabah pandemi global. Sedangkan pada tanggal 13 April 2020 Presiden Republik Indonesia menetapkan Covid-19 sebagai bencana nasional non alam melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan *Corona Virus Disease* 2019 sebagai Bencana Nasional Non Alam. Menanggapi akan hal tersebut, Pemerintah Indonesia dengan cepat mengambil beberapa kebijakan terkait Covid-19, antara lain Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2020, Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2021, serta Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020.

2.6 Hipotesis Penelitian

Teori kebijakan publik mengatakan, Pemerintah harus melakukan tindakan terhadap suatu masalah yang menjadi isu kebijakan publik. Seperti pada saat pandemi Covid-19, mengharuskan Pemerintah untuk mengambil kebijakan dalam pengelolaan keuangan untuk dapat meningkatkan kinerja keuangannya salah satunya pada tingkat kemandirian keuangan. Karena adanya pandemi Covid-19 mengakibatkan banyak sektor yang terdampak salah satunya yaitu sektor ekonomi yang menurun. Oleh karena itu dikhawatirkan dapat mengurangi PAD yang nantinya dapat mempengaruhi tingkat kemandirian keuangan Pemerintah Daerah dari sebelum adanya pandemi Covid-19 dan saat adanya pandemi Covid-19.

H1: Terdapat perbedaan tingkat Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur sebelum pandemi Covid-19 (2019) dan saat pandemi Covid-19 (2020).

Sesuai dengan teori kebijakan publik, mengharuskan Pemerintah melakukan tindakan terhadap suatu masalah yang menjadi isu kebijakan publik seperti pada masa pandemi Covid-19

sekarang ini. Pemerintah harus segera mengambil kebijakan dalam pengelolaan keuangan untuk dapat meningkatkan kinerja keuangannya salah satunya pada tingkat fleksibilitas keuangan. Dengan adanya kejadian pandemi Covid-19, menyebabkan Pemerintah Pusat melakukan tindakan guna mengganti struktur pendapatan dan belanja untuk kegiatan Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang Dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19 yang sesuai dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021. Oleh karena tingkat fleksibilitas keuangan cenderung menurun dari sebelum adanya pandemi Covid-19 dan saat adanya pandemi Covid-19.

H2: Terdapat perbedaan tingkat Fleksibilitas Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur sebelum pandemi Covid-19 (2019) dan saat pandemi Covid-19 (2020).

Pada masa pandemi Covid-19, maka mengharuskan Pemerintah untuk mengambil kebijakan dalam pengelolaan keuangan untuk dapat meningkatkan kinerja keuangannya salah satunya pada tingkat solvabilitas operasional. Solvabilitas operasional merupakan kemampuan Pemerintah Daerah dalam mendatangkan pemasukan untuk memenuhi beban operasionalnya dalam periode anggaran. Adanya kejadian pandemi Covid-19, maka sumbangsih terhadap dana alokasi khusus dilakukan guna percepatan penanganan pandemi Covid-19. Dengan demikian maka dikhawatirkan mengurangi pendapatan yang menyebabkan anggaran untuk operasional berkurang. Oleh karena itu tingkat solvabilitas operasional cenderung menurun dari sebelum adanya pandemi Covid-19 dan saat adanya pandemi Covid-19.

H3: Terdapat perbedaan tingkat Solvabilitas Operasional Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur sebelum pandemi Covid-19 (2019) dan saat pandemi Covid-19 (2020).

Teori kebijakan publik mengatakan, Pemerintah harus melakukan tindakan terhadap suatu masalah yang menjadi isu kebijakan publik. Seperti pada masa pandemi Covid-19, maka mengharuskan pemerintah untuk mengambil kebijakan dalam pengelolaan keuangan untuk dapat meningkatkan kinerja keuangannya salah satunya pada tingkat solvabilitas jangka pendek. Karena adanya kejadian luar biasa pandemi Covid-19 dikhawatirkan dapat mengurangi kemampuan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya karena kemungkinan prioritas utama pemerintah adalah untuk penanganan Covid-19. Oleh karena itu tingkat solvabilitas jangka pendek cenderung menurun dari sebelum adanya pandemi Covid-19 dan saat adanya pandemi Covid-19.

H4: Terdapat perbedaan tingkat Solvabilitas Jangka Pendek Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur sebelum pandemi Covid-19 (2019) dan saat pandemi Covid-19 (2020).

Sesuai dengan teori kebijakan publik, mengharuskan Pemerintah untuk melakukan tindakan terhadap suatu masalah yang menjadi isu kebijakan publik. Seperti pada masa pandemi Covid-19 sekarang ini yang mengharuskan Pemerintah untuk mengambil kebijakan dalam pengelolaan keuangan untuk dapat meningkatkan kinerja keuangannya salah satunya pada tingkat solvabilitas jangka panjang. Adanya pandemi Covid-19 mengakibatkan kemungkinan Pemerintah Daerah yang lebih memprioritaskan untuk penanganan Covid-19 dan mengurangi kemampuan dalam memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Oleh karena itu tingkat solvabilitas jangka panjang cenderung menurun dari sebelum adanya pandemi Covid-19 dan saat adanya pandemi Covid-19.

H5: Terdapat perbedaan tingkat Solvabilitas Jangka Panjang Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur sebelum pandemi Covid-19 (2019) dan saat pandemi Covid-19 (2020).

Pada masa pandemi Covid-19, maka mengharuskan Pemerintah untuk mengambil kebijakan dalam pengelolaan keuangan untuk dapat meningkatkan kinerja keuangannya salah satunya pada tingkat solvabilitas layanan. Hal tersebut sesuai dengan teori kebijakan publik yang memparkan Pemerintah harus melakukan tindakan terhadap suatu masalah yang menjadi isu publik. Dengan adanya pandemi Covid-19, Pemerintah menetapkan kebijakan PSBB yang menganjurkan untuk dirumah saja sehingga kenaikan penduduk terjadi didaerahnya dan Pemerintah Daerah juga memprioritaskan guna penanganan Covid-19 dibandingkan dengan pengeluaran untuk memproleh aset tetap baru atau menambah nilai aset tetap yang sudah ada. Oleh karena itu tingkat solvabilitas layanan cenderung menurun dari sebelum adanya pandemi Covid-19 dan saat adanya pandemi Covid-19.

H6: Terdapat perbedaan tingkat Solvabilitas Layanan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa

Timur sebelum pandemi Covid-19 (2019) dan saat pandemi Covid-19 (2020).

3. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif komparatif. Penelitian komparatif merupakan penelitian yang membandingkan variabel satu dengan variabel lainnya (Sujarweni, 2014:11). Populasi dalam penelitian ini yaitu Kabupaten dan Kota madya se-Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2020. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik sampling jenuh. Sugiyono (2002:61) mengatakan sampling jenuh merupakan teknik pengambilan sampel dimana semua anggota populasi dijadikan sebagai sampel. Jenis data dalam penelitian ini yaitu data dokumenter yang pengumpulan datanya menggunakan dokumen atau arsip di tempat penelitian. Jenis data dalam penelitian ini yaitu LKPD Jawa Timur Tahun 2019-2020 yang telah diaudit BPK Jawa Timur dan data Statistik dari BPS Jawa Timur.

3.3 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

3.3.1 Kemandirian Keuangan

Kemandirian keuangan merupakan kondisi Pemerintah Daerah tidak rentan terhadap sumber pendanaan diluar kendalinya atau pengaruhnya, baik dari sumber- sumber dalam negeri maupun luar negeri.

$$\text{Rasio Kemandirian Keuangan} = \frac{\text{PAD}}{\text{Total Pendapatan}} \times 100\%$$

$$\text{Indeks Kemandirian Keuangan} = \frac{\text{Nilai Aktual} - \text{Nilai Minimum}}{\text{Nilai Maksimum} - \text{Nilai Minimum}}$$

Keterangan :

- Nilai Aktual : Nilai kemandirian keuangan Pemerintah Daerah X selama periode pengamatan.
 Nilai Minimum : Nilai kemandirian keuangan terendah selama periode pengamatan.
 Nilai Maksimum : Nilai kemandirian keuangan tertinggi selama periode pengamatan.

3.3.2 Fleksibilitas Keuangan

Fleksibilitas keuangan merupakan kondisi Pemerintah Daerah dapat meningkatkan sumber daya keuangan untuk menghadapi peningkatan komitmen, baik melalui peningkatan pendapatan atau peningkatan kapasitas utang.

$$\text{Rasio Fleksibilitas Keuangan} = \frac{(\text{Total Pendapatan} - \text{DAK})}{(\text{Total Kewajiban} + \text{Belanja Pegawai})}$$

$$\text{Indeks Fleksibilitas Keuangan} = \frac{\text{Nilai Aktual} - \text{Nilai Minimum}}{\text{Nilai Maksimum} - \text{Nilai Minimum}}$$

3.3.3 Solvabilitas Operasional

Solvabilitas operasional merupakan kemampuan Pemerintah Daerah dalam menghasilkan pendapatan untuk menutupi beban operasional pemerintah selama periode anggaran.

$$\text{Rasio Solvabilitas Operasional} = \frac{\text{Total Pendapatan LO} - \text{Pendapatan DAK}}{\text{Total Beban LO}}$$

$$\text{Indeks Solvabilitas Operasional} = \frac{\text{Nilai Aktual} - \text{Nilai Minimum}}{\text{Nilai Maksimum} - \text{Nilai Minimum}}$$

3.3.4 Solvabilitas Jangka Pendek

Solvabilitas jangka pendek merupakan kemampuan Pemerintah Daerah untuk memenuhi kewajiban keuangannya yang jatuh tempo dalam waktu kurang atau sama dengan 12 bulan.

$$\text{Rasio Solvabilitas Jangka Pendek} = \frac{\text{Kas dan Setara Kas} + \text{Inves. Jangka Pendek}}{\text{Kewajiban Lancar}}$$

$$\text{Indeks Solvabilitas Jangka Pendek} = \frac{\text{Nilai Aktual} - \text{Nilai Minimum}}{\text{Nilai Maksimum} - \text{Nilai Minimum}}$$

3.3.5 Solvabilitas Jangka Panjang

Solvabilitas jangka panjang merupakan kemampuan Pemerintah Daerah untuk memenuhi kewajiban jangka panjang.

$$\text{Rasio Solvabilitas Jangka Panjang} = \frac{\text{Total Aset Tetap}}{\text{Kewajiban Jangka Panjang}}$$

$$\text{Indeks Solvabilitas Jangka Panjang} = \frac{\text{Nilai Aktual} - \text{Nilai Minimum}}{\text{Nilai Maksimum} - \text{Nilai Minimum}}$$

3.3.6 Solvabilitas Layanan

Solvabilitas layanan merupakan kemampuan pemerintah daerah untuk menyediakan dan mempertahankan kualitas pelayanan publik yang dibutuhkan dan diinginkan oleh masyarakat.

$$\text{Rasio Solvabilitas Layanan} = \frac{\text{Total Aset Tetap}}{\text{Jumlah Penduduk}}$$

$$\text{Indeks Solvabilitas Layanan} = \frac{\text{Nilai Aktual} - \text{Nilai Minimum}}{\text{Nilai Maksimum} - \text{Nilai Minimum}}$$

4. Hasil Penelitian

4.1 Deskripsi Data Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur. Penelitian ini memilih Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur dikarenakan Pemerintah Daerah Jawa Timur juga terus menyempurnakan tata kelola keuangan daerah yang semakin baik, dengan menunjukkan peningkatan dalam meraih opini WTP atas LKPD dari BPK Jawa Timur.

Data dalam penelitian ini sebanyak 1.125 data yang didapatkan dari LKPD Provinsi Jawa Timur yang telah diaudit BPK Jawa Timur yaitu data dari LRA, LO, neraca dan data dari BPS Jawa Timur. Data tersebut meliputi: PAD, total pendapatan, DAK, total kewajiban, belanja pegawai, total pendapatan LO, pendapatan DAK, total beban LO, kas dan setara kas, investasi jangka pendek, kewajiban lancar, total aset tetap, kewajiban jangka panjang, total aset tetap, dan jumlah penduduk. Akan tetapi pada penelitian ini, data dari LKPD Kabupaten Jember Tahun 2020 tidak dicantumkan karena Kabupaten Jember masih dalam proses di Aparat Penegak Hukum sehingga LPKD tidak dapat dipublikasikan.

4.2 Analisis Data

4.2.1 Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata, standart deviasi, varian, maksimum, minimum, sum, range, kurtosis dan skewness (Ghozali, 2018:19).

Tabel 1 Statistik Deskriptif

	N	Min	Max	Mean	Std. Deviation
Kemandirian Keuangan 2019	38	,0000	10,000	,159332	,1826474
Kemandirian Keuangan 2020	38	,0000	10,000	,177400	,1935088
Fleksibilitas Keuangan 2019	38	,0000	10,000	,234087	,1717051
Fleksibilitas Keuangan 2020	38	,0000	10,000	,352263	,2078824
Solvabilitas Operasional 2019	38	,0000	10,000	,601308	,1287044
Solvabilitas Operasional 2020	38	,0000	10,000	,382771	,2170888
Solvabilitas Jangka Pendek 2019	38	,0000	10,000	,218576	,2313374
Solvabilitas Jangka Pendek 2020	38	,0000	10,000	,236132	,2342826
Solvabilitas Jangka Panjang 2019	38	,0000	10,000	,032845	,1656407
Solvabilitas Jangka Panjang 2020	38	,0000	10,000	,029024	,1625627
Solvabilitas Layanan 2019	38	,0000	10,000	,241879	,2521915
Solvabilitas Layanan 2020	38	,0000	10,000	,248811	,2708341
Valid N (listwise)	38				

Sumber : data diolah (2021)

4.2.2 Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan guna mengetahui sebaran data apakah berdistribusi normal atau tidak. Apabila nilai signifikansi menunjukkan angka lebih besar dari 0,05 artinya data tersebut dinyatakan berdistribusi normal. Dan apabila nilai signifikansi menunjukkan angka kurang dari 0,05 artinya data tersebut berdistribusi tidak normal (Siregar, 2019:153).

Berdasarkan tabel 2 dapat diketahui bahwa nilai *sig.* (*signification*) berada dibawah *level of significance* 0,05, maka dapat dikatakan bahwa data dalam penelitian ini berdistribusi tidak normal kecuali pada variabel fleksibilitas keuangan tahun 2020 dimana tingkat *Sig.* sebesar $0,200 > 0,05$ dan pada variabel solvabilitas operasional tahun 2020 dimana tingkat *Sig.* sebesar $0,200 > 0,05$ sehingga dapat dikatakan berdistribusi normal.

Tabel 2 Uji Normalitas

	Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
	Statistic	df	Sig.	Statistic	df	Sig.
Kemandirian Keuangan 2019	,213	38	,000	,683	38	,000
Kemandirian Keuangan 2020	,180	38	,003	,743	38	,000
Fleksibilitas Keuangan 2019	,172	38	,006	,744	38	,000
Fleksibilitas Keuangan 2020	,112	38	,200*	,934	38	,027
Solvabilitas Operasional 2019	,264	38	,000	,636	38	,000
Solvabilitas Operasional 2020	,104	38	,200*	,963	38	,246
Solvabilitas Jangka Pendek 2019	,224	38	,000	,796	38	,000
Solvabilitas Jangka Pendek 2020	,197	38	,001	,840	38	,000
Solvabilitas Jangka Panjang 2019	,500	38	,000	,204	38	,000
Solvabilitas Jangka Panjang 2020	,509	38	,000	,176	38	,000
Solvabilitas Layanan 2019	,213	38	,000	,788	38	,000
Solvabilitas Layanan 2020	,221	38	,000	,801	38	,000

*. This is a lower bound of the true significance.

a. Lilliefors Significance Correction

4.2.3 Uji Beda

Berdasarkan hasil uji normalitas yang telah dilakukan oleh peneliti, dapat diketahui sebaran data variabel dinyatakan tidak normal kecuali pada variabel fleksibilitas keuangan tahun 2020 dan pada variabel fleksibilitas keuangan tahun 2020. Oleh karena itu uji paired sample t test tidak dapat digunakan karena sebaran data berdistribusi tidak normal. Uji paired sample t test merupakan pengujian untuk dua sampel berpasangan dengan data berdistribusi normal (Priyanto, 2014:93).

Oleh sebab itu, uji beda yang dilakukan pada penelitian ini yaitu uji wilcoxon. Uji wilcoxon merupakan uji nonparametis alternatif uji paired sample t test dengan data yang berdistribusi tidak normal (Priyanto, 2014:275). Dasar pengambilan keputusan dalam uji wilcoxon signed test adalah sebagai berikut:

- Jika nilai *Asymp.sig 2tailed* < 0,05 maka terdapat perbedaan rata-rata.
- Jika nilai *Asymp.sig 2-tailed* > 0,05 maka tidak terdapat perbedaan rata-rata.

Tabel 3 Uji beda

	Z	Asymp. Sig. (2- tailed)
Kemandirian Keuangan 2020 – Kemandirian Keuangan 2019	-2,738	,006
Fleksibilitas Keuangan 2020 – Fleksibilitas Keuangan 2019	-4,367 ^b	,000
Solvabilitas Operasional 2020 – Solvabilitas Operasional 2019	-4,609 ^c	,000
Solvabilitas Jangka Pendek 2020 – Solvabilitas Jangka Pendek 2019	-1,182 ^b	,237
Solvabilitas Jangka Panjang 2020 – Solvabilitas Jangka Panjang 2019	-,365 ^b	,715
Solvabilitas Layanan 2020 – Solvabilitas Layanan 2019	-,091 ^b	,928
a. Wilcoxon Signed Ranks Test		
b. Based on negative ranks.		
c. Based on positive ranks.		

5. Diskusi

Perbedaan tingkat kemandirian keuangan sebelum dan saat Pandemi Covid19. Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa H1 diterima dengan signifikansi sebesar 0,006 yang lebih kecil dari tingkat *alfa* 0,05. Artinya, terdapat perbedaan tingkat kemandirian keuangan Pemerintah Daerah Jawa Timur sebelum dan saat pandemi Covid-19. Hal tersebut sesuai dengan teori kebijakan publik, dimana Pemerintah melakukan tindakan terhadap suatu masalah yang menjadi isu kebijakan publik. Sependapat dengan penelitian yang dilakukan oleh Habibi, dkk (2021) yang mendapatkan hasil yang sama dalam penelitiannya.

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan untuk H2 diperoleh hasil signifikansi sebesar 0,000. Hasil ini menunjukkan bahwa H2 diterima bahwa terdapat perbedaan tingkat fleksibilitas keuangan Pemerintah Daerah Jawa Timur sebelum dan saat pandemi Covid-19. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Habibi, dkk (2021) yang menyatakan tidak terdapat perbedaan fleksibilitas keuangan sebelum dan saat pandemi Covid-19.

Berikutnya, tingkat solvabilitas operasional sebelum dan saat Pandemi Covid19 berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan, dapat dinyatakan bahwa H3 diterima dengan signifikansi sebesar 0,000 yang lebih kecil dari tingkat *alfa* 0,05. Artinya, terdapat perbedaan tingkat solvabilitas operasional Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur sebelum dan saat pandemi Covid-19. Hasil penelitian ini sama dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Habibi, dkk (2021) yang mengemukakan bahwa terdapat perbedaan pada solvabilitas operasional sebelum dan saat pandemi Covid-19.

Perbedaan tingkat solvabilitas jangka pendek sebelum dan saat Pandemi Covid19 berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan, dapat dinyatakan bahwa H4 ditolak dengan signifikansi sebesar 0,237 yang lebih besar dari tingkat *alfa* 0,05. Artinya, tidak terdapat perbedaan tingkat solvabilitas jangka pendek Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur sebelum dan saat pandemi Covid-19. Tidak adanya perbedaan yang signifikan tingkat solvabilitas jangka pendek Pemerintah Daerah Jawa Timur sebelum pandemi Covid-19 dan saat pandemi Covid-19 karena sebagian besar Pemerintah Daerah Jawa Timur mengalami kenaikan kas dan setara kas serta kewajiban lancar Pemerintah Daerah Jawa Timur. Hanya di Pemerintah Daerah tertentu seperti Kabupaten Bojonegoro yang mengalami peningkatan

kewajiban lancar yang cukup tinggi dibanding Pemerintah Daerah lainnya. Sedangkan Pemerintah Daerah Jawa Timur tidak ada yang memiliki investasi jangka pendek baik sebelum pandemi Covid-19 dan saat pandemi Covid-19. Hal itu sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Habibi, dkk (2021) bahwa tidak terdapat perbedaan pada solvabilitas jangka pendek sebelum dan saat pandemi Covid-19.

Perbedaan tingkat solvabilitas jangka panjang sebelum dan saat Pandemi Covid-19. Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan, dapat dikatakan bahwa H5 ditolak dengan signifikansi sebesar 0,715 yang lebih besar dari tingkat *alfa* 0,05. Artinya, tidak terdapat perbedaan tingkat solvabilitas jangka panjang Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur sebelum dan saat pandemi Covid-19. Tidak adanya perbedaan yang signifikan pada tingkat solvabilitas jangka panjang Pemerintah Daerah Jawa Timur dikarenakan sebagian besar Pemerintah Daerah Jawa Timur sebelum pandemi Covid-19 dan saat pandemi Covid-19 tidak mempunyai hutang jangka panjang. Hanya Kabupaten Malang, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Ponorogo dan Kabupaten Sampang yang memiliki kewajiban jangka panjang. Hal yang sama juga didapati dalam penelitian yang dilakukan oleh Habibi, dkk (2021) yang memperoleh hasil bahwa tidak terdapat perbedaan pada solvabilitas jangka panjang sebelum dan saat pandemi Covid-19.

Perbedaan tingkat solvabilitas layanan sebelum dan saat Pandemi Covid-19. Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan, dapat dikatakan bahwa H6 ditolak dengan signifikansi sebesar 0,928 yang lebih besar dari tingkat *alfa* 0,05. Artinya, tidak terdapat perbedaan tingkat solvabilitas layanan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur sebelum dan saat pandemi Covid-19. Tidak adanya perbedaan yang signifikan pada tingkat solvabilitas layanan Pemerintah Daerah Jawa Timur dikarenakan rata-rata total aset tetap Pemerintah Daerah Jawa Timur sebelum pandemi Covid-19 dan saat pandemi Covid-19 mengalami kenaikan. Dan juga data dari BPS Jawa Timur terjadi kenaikan jumlah penduduk sebanyak 967.065. Kenaikan total aset tetap dan jumlah penduduk dikatakan tidak signifikan terlebih di masa pandemi Covid-19 terjadi penurunan alokasi anggaran untuk pembiayaan jangka panjang dalam bentuk aset tetap. Penelitian lain yang dilakukan oleh Habibi, dkk (2021) juga memperoleh hasil yang sama bahwa tidak terdapat perbedaan pada solvabilitas layanan sebelum dan saat pandemi Covid-19.

6. Kesimpulan

Terdapat perbedaan pada kemandirian keuangan, fleksibilitas keuangan dan solvabilitas operasional Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur sebelum dan saat pandemi Covid-19. Dan tidak terdapat perbedaan pada solvabilitas jangka pendek, solvabilitas jangka panjang, solvabilitas layanan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur sebelum dan saat pandemi Covid-19. Terkait dengan hasil penelitian ini, maka disarankan bagi peneliti selanjutnya dapat menggunakan data lebih dari 2 periode akuntansi dikarenakan pandemi Covid-19 masih berlanjut hingga tahun 2021.

Referensi

- Bungin, Bugan. (2005). *Metodologi Penelitian Kuantitatif: Komunikasi, Ekonomi Dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Fatmawati, T. O. (2020). Pengaruh Pendapatan Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 9(4), 1-20.
- Fazlurahman, F., Fatriananda, C., & Jauhari, R. (2020). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Bandung Sebelum Dan Setelah Mendapatkan Opini WTP Dari BPK. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Global Masa Kini*, 11(1), 56-62.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP.
- Habibi, K. A., Imtikhanah, S., & Hidayah, R. (2021). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Se-Provinsi Jawa Tengah Sebelum Dan Saat Pandemi Covid-19. *Jurnal Neraca*, 17(1), 122-147.

- Hermana, D., Ulumudin, A., Yudiardi, Y. (2019). *Kebijakan Publik*. Garut: Universitas Garut.
- Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, Serta Pengadaam Barang Dan Jasa.
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan *Corona Virus Disease* 2019 Sebagai Bencana Nasional Non Alam.
- Maizunati, N.A. (2017). Analisis Kondisi Keuangan Pemerintah Daerah Kota Magelang Dalam Klaster Kota Di Jawa-Bali. *Jurnal Riset Akuntansi Keuangan*, 15(2), 141-162.
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: CV Andi Offset.
- Mustari, Nuryanti. (2015). *Pemahaman Kebijakan Publik*. Yogyakarta: PT Leutika Nouvelitera.
- Nurabiah. (2018). Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Yang Memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian Di Provinsi Nusa Tenggara Barat. *Jurnal Aplikasi Akuntansi*, 3(1), 67-100.
- Nuraini, F., Andi, K., Amelia, Y., & Dharma, F. (2019). Perbandingan Kinerja Keuangan Pemerintah Propinsi Di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 24(1), 23-35.
- Nurhayati, N., Rizani, F., & Kadir. (2019). Perbandingan Kinerja Pemerintah Daerah Di Indonesia. *Jurnal InFestasi*, 15(1), 67-82.
- Oktavian, D. N. D., & Astuti, P. (2020). Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2017-2018. *Prosiding Seminar Nasional Manajemen, Ekonomi Dan Akuntansi 2020*, 5(1), 145-151.
- Onibala, A., Rostinsulu, T. O., & Rorong, I. P. F. (2021). Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 22(2), 67-89.
- Pedoman Penulisan Proposal Dan Skripsi Edisi Revisi 2021 Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Gresik.
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan.
- Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 Tentang Percepatan Penanganan Corona.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Menteri Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah.
- Priyanto, Duwi. (2014). *SPSS 22: Pengolahan Data Terpraktis*. Yogyakarta: CV Andi Offset.
- Prasetyo, Bambang. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif: Teori Dan Aplikasi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Putra, B. P., & Hidayah, R. U. (2020). Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten/Kota Sebelum Dan Setelah Pemekaran Daerah Sumatera Selatan. *Journal of Economic, Business and accounting*, 4(1), 19-26.
- Siregar, Syofian. (2019). *Statistik Parametrik Untuk Penelitian Kuantitatif: Dilengkapi dengan Perhitungan Manual dan Aplikasi SPSS Versi 17*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Sujarweni, F. W. (2014). *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: PT Pustaka Baru.
- Sugiyono. (2002). *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: CV Alfabeta.
- Sugotro, W., Paramita, P. D., & Suprijanto, A. (2018). Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Pengalokasian Belanja Modal Dengan Luas Wilayah Sebagai Variabel Moderating Pada Pemerintahan Kota Semarang Tahun 2011- 2016. *Journal of Accounting*, 4(4), 1-20.
- Sumitro. (2020). Perbedaan Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Dan Pemerintah Kota Di Jawa Timur. *Jurnal Mitra Manajemen*, 4(10), 1472- 1485.
- Tarmizi, R., Khairudin, & Jayadi, A. (2014). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah daerah kota Bandar Lampung Sebelum dan Setelah Memperoleh Opini WTP.

- Jurnal Akuntansi dan Keuangan* , 5, 71-90.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah.
- Yati, I. R & Asmara J, A. (2020). Analisis Indeks Kondisi Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Aceh Tahun 2015-2017. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*. 5(2), 297-306.